GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Adipura
Tanggal : 27 Maret 2007
Hari : selasa
Halaman : 11

Adipura "Musuh" Pedagang Kaki Lima



Para pejabat di lingkungan Pemkot Jakbar saat melakukan inspeksi di Pasar Jembatan Dua, Jakbar, belum lama ini.

Peraih penghargaan Bangun Praja atau Piala Adipura adalah suatu kebanggaan bagi sebuah daerah. Karena penghargaan itu diniali sebagai suatu yang bergengsi.

Tetapi, apakah kebangaan yang dirasakan oleh pejabat-pejabat pemerintah setempat juga sama dirasakan oleh masyarakatnya?

Memang harus diakui, ada masyarakat yang juga bangga, teta- pi juga ada masyarakat yang apatis, bahkan juga tidak bangga.

Biasanya, mereka yang tidak ikut bangga adalah masyarakat yang mengalami dampak negatif dari persiapan pemerintah daerahnya untuk mendapat penilaian tertinggi dari dewan juri. Mereka sebagai besar dari sektor informal, atau yang lebih dikenal dengan pedagang kaki lima (PKL).

Sudah jelas, selama ada penilaian Bangun Praja atau Adipura, mereka pun ikut tergusur. Tidak tanggung-tanggung, mereka harus berhenti berdagang dalam kurun waktu sebulan. Adipura itu bisa menjadi musuh para PKL.

Bisa dibayangkan, selama itu pula mereka harus berjuang keras untuk menghidupi keluarganya, atau hanya sekadar mengebulkan asap dapurnya.

"Seharusnya, pemerintah menyediakan tempat alternatif bagi kami untuk berdagang, bukan main gusur saja," ujar Kojan, salah seorang pedagang yang biasa mangkal di kawasan Taman Se- gitiga, Sungai Bambu Tanjung Priok, Jakarta Utara itu.

Dia mengungkapkan, hampir setiap ada penilaian Adipura, dagangannya harus terkena gusur. Padahal, kehidupan keluarganya sangat bergantung dari hasil dagangannya tersebut.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Hal yang sama juga diungkapkan Sani, salah seorang PKL yang biasa mangkal di sekitar Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat. Dia mengakui, terpaksa harus main petak umpet dengan petugas tramtib dan linmas.

Tetapi, sejak beberapa hari ini, dia memang benar-benar berhenti beroperasi, karena wilayah "jajahannya" selalu mendapat penjagaan oleh petugas tramtib dan linmas.

Tidak Konsisten

Memang, adanya baiknya jika wilayah yang terlarang untuk berdagang bersih dari PKL. Namun sayangnya, ketidakkonsistenan pemerintah setempat dalam hal ini sangatlah besar.

Biasanya, setelah penilaian berlangsung, para PKL itu kembali diizinkan berdagang, mengingat mereka adalah lahan "basah" bagi oknum-oknum kelurahan atau kecamatan untuk mengais rezeki.

Seharusnya pemerintah setempat konsisten dalam menerapkan aturannya. Karena, jika semua wilayah DKI Jakarta bersih lingkungan, tidak hanya bisa meraih penghargaan Adipura, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakatnya, yakni hidup menuju sehat.

Karena itu, sebaiknya Adipura atau Bangun Praja hanya dijadikan sasaran antara saja. Tetapi kebersihan lingkungan harus menjadi target utama untuk menuju Jakarta yang sehat dan bersih. [M-16]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup